



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 216 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 dirinci sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 2.389.604.229.617
b. Belanja Daerah	Rp 2.497.822.779.133
	Defisit Rp 108.218.549.516
c. Pembiayaan Daerah	Rp 108.218.549.516
1. Penerimaan	Rp 117.218.549.516
2. Pengeluaran	Rp 9.000.000.000
	Pembiayaan Netto Rp 108.218.549.516
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp 0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.2.389.604.229.617,00 (Dua trilyun tiga ratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 274.933.929.236,00 (Dua ratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.78.312.000.000,00 (Tujuh puluh delapan milyar tiga ratus dua belas juta rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.8.760.294.069,00 (Delapan milyar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.12.227.517.924,00 (Dua belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh empat).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.175.634.117.243,00 (Seratus tujuh puluh lima milyar enam ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.78.312.000.000,00 (Tujuh puluh delapan milyar tiga ratus dua belas juta), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel, sebesar Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta);
 - b. pajak restoran, sebesar Rp.5.200.000.000,00 (Lima milyar dua ratus juta);
 - c. pajak hiburan, sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - d. pajak reklame, sebesar Rp.650.000.000,00 (Enam ratus lima puluh juta);
 - e. pajak penerangan jalan, sebesar Rp.32.000.000.000,00 (Tiga puluh dua milyar);
 - f. pajak parkir, sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - g. pajak air tanah, sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - h. pajak sarang burung walet, sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya, sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, sebesar Rp.28.500.000.000,00 (Dua puluh delapan milyar lima ratus juta);
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sebesar Rp.11.500.000.000,00 (Sebelas milyar lima ratus juta)
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.8.760.294.069,00 (Delapan milyar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum sebesar Rp.7.419.729.569,00 (Tujuh milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh sembilan);
 - b. retribusi jasa usaha sebesar Rp.1.074.692.500,00 (Satu milyar Tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp.265.872.000,00 (Dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu)
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.12.227.517.924,00 (Dua belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh empat), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.175.634.117.243,00 (Seratus tujuh puluh lima milyar enam ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, sebesar Rp.14.300.000,00 (Empat belas juta tiga ratus ribu);
 - b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, sebesar Rp.1.609.150.000,00 (Satu milyar enam ratus sembilan juta seratus lima puluh ribu);
 - c. jasa giro, sebesar Rp.2.578.500.000,00 (Dua milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu);
 - d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara, sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)
 - e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
 - f. pendapatan dari pengembalian, sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
 - g. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah, sebesar Rp. 168.383.125.243,00 (Seratus enam puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah); dan
 - h. pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir, sebesar Rp.46.042.000,00 (Empat puluh enam juta empat puluh dua ribu rupiah)

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp.2.091.642.097.381,00 (Dua triliun sembilan puluh satu milyar enam ratus empat puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) , yang terdiri dari atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.916.637.377.000,00 (Satu triliun sembilan ratus enam belas milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan sebesar Rp.1.686.856.045.000,00 (Satu triliun enam ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus lima puluh enam juta empat puluh lima ribu);
 - b. dana desa sebesar Rp.229.781.332.000,00 (Dua ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.175.004.720.381,00 (Seratus tujuh puluh lima milyar empat juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh satu) yang terdiri dari pendapatan bagi hasil.

Pasal 7

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp.23.028.203.000,00 (Dua puluh tiga milyar dua puluh delapan juta dua ratus tiga ribu), yang terdiri dari pendapatan hibah.

Pasal 8

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp (terbilang).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp (terbilang).

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.2.497.822.779.133,00 (Dua triliun empat ratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.648.899.074.646,00 (Satu triliun enam ratus empat puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.009.617.951.503,00 (Satu triliun sembilan milyar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.552.052.346.143,00 (Lima ratus lima puluh dua milyar lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.84.153.537.000,00 (Delapan puluh empat milyar seratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.3.075.240.000,00 (Tiga milyar tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.009.617.951.503,00 (Satu triliun sembilan milyar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.622.919.555.213,00 (Enam ratus dua puluh dua milyar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.109.359.470.526,00 (Seratus sembilan milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.186.444.195.155,00 (Seratus delapan puluh enam milyar empat ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.22.480.354.039,00 (Dua puluh dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga puluh sembilan rupiah).

- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.1.405.509.152,00 (Satu milyar empat ratus lima juta lima ratus sembilan ribu seratus lima puluh dua).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.852.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (8) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.66.156.867.418,00 (Enam puluh enam milyar seratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.622.919.555.213,00 (Enam ratus dua puluh dua milyar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.467.787.506.830,00 (Empat ratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.43.388.279.406,00 (Empat puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.6.128.832.936,00 (Enam milyar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 33.158.761.095,00 (tiga puluh tiga milyar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.8.445.219.105,00 (delapan milyar empat ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh lima rupiah).

- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.24.633.067.629,00 (Dua puluh empat milyar enam ratus tiga puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.2.552.376.496,00 (Dua milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.37.493.750,00 (Tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.29.617.422.763,00 (Dua puluh sembilan milyar enam ratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah)
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.1.051.045.390,00 (Satu milyar lima puluh satu juta empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (12) Belanja jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp.2.981.226.738,00 (Dua milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp.3.138.323.075,00 (Tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 109.359.470.526,00 (seratus sembilan milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.7.890.088.206,00 (Tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta delapan puluh delapan ribu dua ratus enam).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.6.932.251.914,00 (Enam milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat belas).

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.18.938.400,00 (Delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.94.518.192.006,00 (Sembilan puluh empat milyar lima ratus delapan belas juta seratus sembilan puluh dua ribu enam rupiah).

Pasal 14

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.186.444.195.155,00 (Seratus delapan puluh enam milyar empat ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
 - e. Belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.2.873.912.000,00 (Dua milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.2.891.615.662,00 (Dua milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.171.753.409.000,00 (Seratus tujuh puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu).
- (5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.1.942.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta).
- (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 4.109.130.000,00 (Empat milyar seratus sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.22.480.354.039,00 (Dua puluh dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. belanja Uang Paket DPRD;
 - e. belanja Tunjangan Jabatan DPRD;

- f. belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - g. belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - i. belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - k. belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.004.010.000,00 (Satu milyar empat juta sepuluh ribu).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.140.561.400,00 (Seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus).
 - (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.299.209.519,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu lima ratus sembilan belas).
 - (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.100.401.000,00 (Seratus juta empat ratus satu ribu).
 - (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.1.455.814.500,00 (Satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus).
 - (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.214.797.300,00 (Dua ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus).
 - (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, sebesar Rp.5.670.000.000,00 (Lima milyar enam ratus tujuh puluh juta).
 - (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.1.417.500.000,00 (Satu milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu).
 - (10) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, direncanakan sebesar Rp.63.750.000,00 (Enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (11) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.417.202,00 (Empat ratus tujuh belas ribu dua ratus dua rupiah).
 - (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp.6.297.103.118,00 (Enam milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga ribu seratus delapan belas rupiah).
 - (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp.5.383.500.000,00 (Lima milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp.430.290.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu).

Pasal 16

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.405.509.152,00 (Satu milyar empat ratus lima juta lima ratus sembilan ribu seratus lima puluh dua), yang terdiri dari:
- a. belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.67.591.892,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.32.889.896,00 (tiga puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.100.548.000,00 (seratus juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.8.166.540,00 (delapan juta tiga ratus dua ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.13.402.900,00 (tiga belas juta empat ratus dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.194.995,00 (seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.575.500,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah (seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.1.122.892.800,00(Satu milyar seratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp.52.594.379,00 (Lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan).

Pasal 17

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah)
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 18

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.66.156.867.418,00 (Enam puluh enam milyar seratuslima puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.552.052.346.143,00 (Lima ratus lima puluh dua milyar lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.94.867.779.153,00 (Sembilan puluh empat milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.189.307.428.060,00 (Seratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.34.019.673.340,00 (Tiga puluh empat milyar sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.41.806.773.800,00 (Empat puluh satu milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.25.493.858.500,00 (Dua puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.110.415.663.242,00 (Seratus sepuluh milyar empat ratus lima belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.94.867.779.153,00 (Sembilan puluh empat milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.94.560.882.153,00 (Sembilan puluh empat milyar lima ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.306.897.000,00 (Tiga ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.189.307.428.060,00 (Seratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.122.674.077.656,00 (Seratus dua puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.26.557.324.379,00 (Dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.4.853.259.000,00 (Empat milyar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
 - (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.1.376.939.000,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
 - (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.55.416.000,00 (Lima puluh lima juta empat ratus enam belas ribu rupiah).
 - (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.4.262.000.000,00 (Empat milyar dua ratus enam puluh dua juta rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.5.116.000.000,00 (Lima milyar seratus enam belas juta rupiah).
 - (9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.24.257.989.000,00 (Dua puluh empat milyar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
 - (10) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp.78.572.025,00 (Tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh lima).

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.34.019.673.340,00 (Tiga puluh empat milyar sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan tanah;

- b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.98.000.000,00 (Sembilan puluh delapan juta rupiah).
 - (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.6.107.168.140,00 (Enam milyar seratus tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.22.514.586.200,00 (Dua puluh dua milyar lima ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah).
 - (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.5.292.419.000,00 (Lima milyar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 23

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.41.806.773.800,00 (Empat puluh satu milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri atas perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.25.493.858.500,00 (Dua puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.24.476.200.000,00 (Dua puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.017.658.500,00 (Satu milyar tujuh belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 25

Anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.110.415.663.242,00 (Seratus sepuluh milyar empat ratus lima belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.84.153.537.000,00 (Delapan puluh empat milyar seratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.7.590.000.000,00 (Tujuh milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.74.055.257.000,00 (Tujuh puluh empat milyar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.2.508.280.000,00 (Dua milyar lima ratus delapan juta dua ratus delapan puluh ribu).

Pasal 27

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, direncanakan sebesar Rp.7.590.000.000,00 (Tujuh milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri dari belanja hibah uang kepada pemerintah pusat.

Pasal 28

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, direncanakan sebesar Rp.74.055.257.000,00 (Tujuh puluh empat milyar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - d. Belanja Hibah Kepada Koperasi
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.67.785.257.000,00 (Enam puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.3.180.000.000,00 (Tiga milyar seratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.2.190.000.000,00 (Dua milyar seratus sembilan puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah Kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 29

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.2.508.280.000,00 (Dua milyar lima ratus delapan juta dua ratus delapan puluh ribu) yang terdiri atas Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 3.075.240.000,00 (Tiga milyar tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu), yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
- (3) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, direncanakan sebesar Rp.3.045.000.000,00 (Tiga milyar empat puluh lima juta)
- (4) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, direncanakan sebesar Rp.30.240.000,00 (Tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu)

Pasal 31

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, direncanakan sebesar Rp.385.724.253.817,00 (Tiga ratus delapan puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
- e. belanja modal aset tetap lainnya;

Pasal 32

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, direncanakan sebesar Rp.10.569.989.295,00 (Sepuluh milyar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri atas belanja modal tanah.

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, direncanakan sebesar Rp.72.016.568.350,00 (Tujuh puluh dua milyar enam belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal rambu-rambu; dan
 - l. belanja modal dan peralatan mesin badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.920.358.000,00 (Satu milyar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.6.123.125.000,00 (Enam milyar seratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.12.769.000,00 (Dua belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.391.617.300,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.4.997.857.798,00 (Empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.196.525.000,00 (Seratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.21.612.420.808,00 (Dua puluh satu milyar enam ratus dua belas juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan).

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.242.987.518,00 (Dua puluh satu milyar enam ratus dua belas juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, direncanakan sebesar Rp.7.183.080.063,00 (Tujuh milyar seratus delapan puluh tiga juta delapan puluh ribu enam puluh tiga rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.3.026.510.000,00 (Tiga milyar dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp.16.427.323.280,00 (Enam belas milyar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh).
- (13) Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, direncanakan sebesar Rp.9.881.994.583,00 (Sembilan milyar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, direncanakan sebesar Rp.84.759.541.610,00 (Delapan puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus sepuluh), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.82.342.807.000,00 (Delapan puluh dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu), yang terdiri dari belanja modal bangunan gedung tempat kerja.
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.95.599.607.000,00 (Sembilan puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, direncanakan sebesar Rp.198.005.753.500,00 (Seratus sembilan puluh delapan milyar lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jaringan badan layanan umum daerah.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.146.835.288.000,00 (Seratus empat puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.30.992.478.000,00 (Tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.17.671.987.500,00 (Tujuh belas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.2.296.000.000,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.210.000.000,00 (Dua ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 31 huruf e, direncanakan sebesar Rp.9.532.335.672,00 (Sembilan milyar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal aset tetap lainnya belanja operasional sekolah;
 - b. belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum daerah;
 - c. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.8.012.066.672,00 (Delapan milyar dua belas juta enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua).
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.575.000.000,00 (Lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 37

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, direncanakan sebesar Rp.6.834.247.670,00 (Enam milyar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, direncanakan sebesar Rp.456.365.203.000,00 (Empat ratus lima puluh enam milyar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.8.274.680.000,00 (Delapan milyar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu), yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, direncanakan sebesar Rp.7.431.200.000,00 (Tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu)
- (4) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, direncanakan sebesar Rp.843.480.000,00 (Delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu)

Pasal 39

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.448.090.523.000,00 (Empat ratus empat puluh delapan milyar sembilan puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Pasal 40

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.108.218.549.516,00 (Seratus delapan milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah), yang terdiri dari atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.117.218.549.516,00 (Seratus tujuh belas milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah), yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (3) pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.9.000.000.000,00 (Sembilan milyar), yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 41

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (2), direncanakan sebesar Rp.117.218.549.516,00 (Seratus tujuh belas milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah), terdiri atas :

- a. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah;
- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat;
- c. penghematan belanja; dan
- d. sisa belanja lainnya.

Pasal 42

- (1) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 41 huruf a, direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah), terdiri atas Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Pajak Daerah.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 41 huruf b, direncanakan sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah), terdiri atas pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat;
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direncanakan sebesar Rp.9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada pasal 42 huruf c, direncanakan sebesar Rp.82.218.549.516,00 (Delapan puluh dua milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah), terdiri atas :
 - a. penghematan belanja – belanja operasi; dan
 - b. penghematan belanja – belanja modal.
- (5) Penghematan Belanja - Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a, direncanakan sebesar Rp.74.218.549.516,00 (Tujuh puluh empat milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah).
- (6) Penghematan Belanja - Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b, direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,00 (Delapan milyar rupiah).
- (7) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 42 huruf d, direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 43

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.108.218.549.516,00 (Seratus delapan milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.108.218.549.516,00 (Seratus delapan milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah).

Pasal 44

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Bentuk dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 47

Pelaksanaan penjabaran APBD dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 48

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 28 Desember 2022

The seal is circular with a purple border. Inside, there is a central emblem featuring a Garuda bird. The text "BUPATI NGAWI" is written in a semi-circle at the top, and "NGAWI" is written at the bottom. A star is visible on the left side of the seal.
BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi

pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

The seal is circular with a purple border. Inside, there is a central emblem featuring a Garuda bird. The text "PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI" is written around the top inner edge, and "SETDA" is written in the center. A star is visible on the left side of the seal.


MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 216

KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	274.933.929.236
4.1.01	Pajak Daerah	78.312.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	90.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	77.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	77.000.000
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	10.000.000
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	10.000.000
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	3.000.000
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	3.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	5.200.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	185.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	185.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	680.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	680.000.000
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	2.035.000.000
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	2.035.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.300.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.300.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	80.000.000
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	2.000.000
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	2.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	68.000.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	68.000.000
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	10.000.000
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	10.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	650.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	470.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	470.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	180.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	180.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	32.000.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	32.000.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	32.000.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	40.000.000

KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	40.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	40.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	75.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	75.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	75.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	7.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	7.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	7.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	170.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	170.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	170.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	28.500.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	28.500.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	28.500.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.500.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	11.000.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	11.000.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	500.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	500.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	8.760.294.069
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	7.419.729.569
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	45.800.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	45.800.000
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	3.500.000
4.1.02.01.03.0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	3.500.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.018.450.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.018.450.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.558.684.569
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	305.951.903
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	380.602.789
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	872.129.877
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	423.295.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	423.295.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	45.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	45.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	325.000.000

KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	325.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.074.692.500
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	177.825.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	52.000.000
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	15.600.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	88.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	22.225.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	63.065.000
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	63.065.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	129.302.500
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	129.302.500
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	21.500.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	21.500.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	555.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	555.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	128.000.000
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	74.500.000
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	18.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	35.500.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	265.872.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	260.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	260.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.872.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.872.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.227.517.924
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	12.227.517.924
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.214.850.619
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.214.850.619
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	12.667.305
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	12.667.305
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	175.634.117.243
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	14.300.000
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	300.000

KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	300.000
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	14.000.000
4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	14.000.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.609.150.000
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	1.609.150.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	1.609.150.000
4.1.04.05	Jasa Giro	2.578.500.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	51.000.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	51.000.000
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	27.500.000
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	27.500.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	0
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.000.000.000
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	3.000.000.000
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	3.000.000.000
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	2.000.000
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.000.000
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.000.000
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.000.000
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	1.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	168.383.125.243
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	168.383.125.243
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	168.383.125.243
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	46.042.000
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	46.042.000
4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	46.042.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.091.642.097.381
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.916.637.377.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.686.856.045.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	268.689.954.000

KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	14.492.579.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	19.489.386.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	1.116.899.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	36.758.525.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	192.545.316.000
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	807.637.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	10.151.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	718.146.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.464.566.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.286.749.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.000.221.097.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	917.075.981.000
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	800.000.000
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	82.345.116.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	123.664.677.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.223.427.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.928.983.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8.116.908.000
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	987.654.000
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	40.827.868.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.198.664.000
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	49.270.167.000
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0

KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0
4.2.01.01.03.0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	6.487.199.000
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	3.623.807.000
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	294.280.317.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	80.580.560.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	150.358.971.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.477.750.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	13.723.500.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.003.280.000
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	700.000.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8.324.262.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	25.570.270.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	8.598.323.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	468.951.000
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	386.000.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	649.650.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0
4.2.01.02.01	DID	0
4.2.01.02.01.0001	DID	0
4.2.01.05	Dana Desa	229.781.332.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	229.781.332.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	229.781.332.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	175.004.720.381
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	175.004.720.381
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	175.004.720.381
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	56.428.015.591
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	25.603.350.725
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	34.651.379.125
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	282.481.940
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	58.039.493.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.028.203.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	23.028.203.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	23.028.203.000

KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	23.028.203.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	23.028.203.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	0
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	0
	Jumlah Pendapatan	2.389.604.229.617
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.648.899.074.646
5.1.01	Belanja Pegawai	1.009.617.951.503
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	622.919.555.213
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	467.787.506.830
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	434.312.913.755
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	33.474.593.075
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	43.388.279.406
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	39.514.390.982
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.873.888.424
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.128.832.936
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.128.832.936
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	33.158.761.095
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	30.984.201.495
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.174.559.600
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.445.219.105
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	8.445.219.105
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	24.633.067.629
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	23.164.259.017
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.468.808.612
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.552.376.496
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.523.208.896
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	29.167.600
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	37.493.750
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	31.635.465
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.858.285
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	29.617.422.763
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	28.641.587.273

KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	975.835.490
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.051.045.390
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	995.469.399
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	55.575.991
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	2.981.226.738
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	2.848.047.030
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	133.179.708
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	3.138.323.075
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	3.049.584.302
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	88.738.773
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	109.359.470.526
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.890.088.206
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.890.088.206
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	6.932.251.914
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	6.932.251.914
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	18.938.400
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	18.938.400
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	94.518.192.006
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	94.090.257.237
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	427.934.769
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	186.444.195.155
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.873.912.000
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	3.223.500
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	128.502.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	4.428.300
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	23.148.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.216.299.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	1.620.500
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.981.500
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	221.500
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.944.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	958.578.700
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	526.965.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.891.615.662
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	2.472.487.507

KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.280.000
5.1.01.03.02.0003	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN	292.500
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	268.701.656
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	62.342.545
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	17.393.570
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	10.362.500
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	11.369.550
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	7.248.146
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	806.250
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	20.475.000
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.006.250
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	15.600.000
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	250.188
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	171.753.409.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	171.753.409.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.942.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.942.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.774.416.493
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.774.416.493
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.109.130.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.658.560.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	138.720.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	311.850.000
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	899.712.000
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	899.712.000
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	200.000.000
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	200.000.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	22.480.354.039
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000

KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	299.209.519
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	299.209.519
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	100.401.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	100.401.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	214.797.300
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	214.797.300
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	63.750.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	63.750.000
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	417.202
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	417.202
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.297.103.118
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	103.958.988
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	7.620.480
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	16.323.650
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.169.200.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.386.500.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.386.500.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	430.290.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	430.290.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.405.509.152
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	67.591.892
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	67.591.892
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	32.889.896
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	32.889.896
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.548.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.548.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.166.540
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.166.540
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	13.402.900

KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	13.402.900
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.250
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.250
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.650.000
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.650.000
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	194.995
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	194.995
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	575.500
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	575.500
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.122.892.800
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1.316.650
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	52.486.350
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.808.700
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	9.454.800
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	496.797.850
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	661.850
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.626.200
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	90.500
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.836.400
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	534.289.700
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	21.523.800
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	52.594.379
5.1.01.05.11.0003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	82.500
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.842.466
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	26.675.805
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	739.357
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	5.362.500
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.016.700
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	724.782
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-	268.750

KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
	Rumah Potong Hewan	
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.775.000
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	668.750
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	4.400.000
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	37.769
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	66.156.867.418
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	66.156.867.418
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	66.156.867.418
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	552.052.346.143
5.1.02.01	Belanja Barang	94.867.779.153
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	94.560.882.153
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.829.170.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	277.835.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.955.537.040
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	568.964.020
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.700.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	53.941.465
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.873.739.429
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	268.402.100
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	3.349.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.501.798.944
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.643.172.099
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	551.873.250
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	692.703.616
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	844.911.610
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.911.765.936
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.140.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	932.135.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	1.393.552.975

KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
	Lainnya	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.551.302.500
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	129.200.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.570.521.121
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	46.950.000
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	146.187.541
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	288.210.000
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	266.490.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.861.601.100
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.667.065.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	592.990.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.050.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.246.302.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	45.000.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	185.360.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	116.325.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	412.913.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	109.937.324
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	19.500.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	15.750.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	154.576.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	48.790.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	276.809.083
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	430.408.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	69.953.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	306.897.000
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	6.125.000
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	88.772.000
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	212.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	189.307.428.060
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	122.674.077.656
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.401.301.930

KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.197.520.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	51.786.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	100.200.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	0
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	71.450.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	351.900.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	9.555.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.866.325.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	205.004.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.918.075.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	178.200.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.295.845.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	924.000.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	233.165.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	78.480.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	405.006.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.728.040.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.162.998.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.673.372.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.094.486.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.392.714.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.676.633.900
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	3.850.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	154.200.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	65.100.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	197.542.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	8.400.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.000.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	28.348.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	2.092.712.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	11.516.350.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	50.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	36.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	272.579.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	3.700.000

KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	1.398.968.500
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	934.210.702
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.759.406.500
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	529.744.370
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	702.110.950
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	21.619.640.804
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	983.182.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.715.939.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	8.785.000
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	6.000.000
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	27.450.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	777.248.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	4.129.109.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	90.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	26.557.324.379
5.1.02.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.796.987.000
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	18.932.610.379
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.867.240.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	578.840.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	364.480.000
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	17.167.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.853.259.000
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	19.700.000
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	156.366.000
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	1.196.437.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.228.524.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	103.819.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0
5.1.02.02.04.0086	Belanja Sewa Alat Kalibrasi	7.421.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	292.878.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	400.865.000
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	39.000.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	74.272.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	257.250.000
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	10.000.000
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	51.727.000
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	15.000.000

KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.376.939.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	484.765.000
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	25.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	127.560.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	736.614.000
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	25.226.000
5.1.02.02.06.0126	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	25.226.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	55.416.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	39.504.000
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	15.912.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.262.000.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	186.500.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	22.000.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	982.500.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	536.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	721.000.000
5.1.02.02.08.0010	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	0
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	955.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	118.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	437.000.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	184.000.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	5.000.000
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	75.000.000
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	40.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.116.000.000
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	120.000.000
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	62.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.330.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	2.110.000.000

KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	740.800.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	753.200.000
5.1.02.02.09.0016	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	0
5.1.02.02.09.0021	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisata	0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	24.257.989.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.386.250.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	9.845.529.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	9.081.500.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	944.710.000
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	78.572.025
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	78.572.025
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	50.625.000
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	50.625.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	34.019.673.340
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	98.000.000
5.1.02.03.01.0028	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	98.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.107.168.140
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	300.000.000
5.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	60.000.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	30.000.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	29.780.000
5.1.02.03.02.0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	200.000.000
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	200.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.310.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.175.830.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	55.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	30.000.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	165.248.000
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	355.000.000

KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	6.056.820
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.000.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	91.200.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	29.586.905
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	596.580.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	20.000.000
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	265.000.000
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	43.386.415
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	84.150.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	750.220.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	120.500.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	109.830.000
5.1.02.03.02.0429	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya	60.000.000
5.1.02.03.02.0455	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya	4.800.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22.514.586.200
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	20.677.536.200
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	0
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	230.000.000
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	50.000.000
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	240.500.000
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	102.050.000
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	184.000.000
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	268.000.000
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	200.000.000

KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	514.500.000
5.1.02.03.03.0062	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	48.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.292.419.000
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	3.326.449.000
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	374.570.000
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	180.000.000
5.1.02.03.04.0052	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	550.000.000
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	311.400.000
5.1.02.03.04.0100	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	240.000.000
5.1.02.03.04.0113	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya	60.000.000
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	50.000.000
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	100.000.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	100.000.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.500.000
5.1.02.03.05.0047	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya	7.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	41.806.773.800
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.806.773.800
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.976.105.800
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	4.447.887.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.059.360.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	926.853.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.396.568.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.493.858.500
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.476.200.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	880.400.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	26.000.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	23.551.800.000
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian	18.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.017.658.500
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	927.508.500
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	90.150.000

KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	56.141.170.048
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	56.141.170.048
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	56.141.170.048
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	110.415.663.242
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	110.415.663.242
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	110.415.663.242
5.1.05	Belanja Hibah	84.153.537.000
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	7.590.000.000
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	7.058.000.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	7.058.000.000
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	532.000.000
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	532.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	74.055.257.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	67.785.257.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	49.095.880.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	18.689.377.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.180.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.180.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.190.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.090.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	100.000.000
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	900.000.000
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	900.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.508.280.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.508.280.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.508.280.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.075.240.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.075.240.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	3.045.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	3.045.000.000

KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	30.240.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	30.240.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0
5.2	BELANJA MODAL	385.724.253.817
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.569.989.295
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	10.569.989.295
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	8.299.989.295
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	8.299.989.295
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	2.270.000.000
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	2.000.000.000
5.2.01.01.03.0019	Belanja Modal Lapangan Lainnya	270.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.016.568.350
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.920.358.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	780.000.000
5.2.02.01.01.0007	Belanja Modal Compacting Equipment	780.000.000
5.2.02.01.01.0009	Belanja Modal Loader	0
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.140.358.000
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	600.000.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	36.358.000
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	504.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	6.123.125.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.123.125.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.889.872.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.826.283.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.271.328.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.135.642.000
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	12.769.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	12.769.000

KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	12.769.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0
5.2.02.03.03.0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	0
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	391.617.300
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	391.617.300
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	30.000.000
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	361.617.300
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.997.857.798
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	808.461.298
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	808.461.298
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.184.396.500
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.682.332.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	965.055.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	95.942.000
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	441.067.500
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.000.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	5.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	196.525.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	170.246.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	76.500.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	93.746.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	21.719.000
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	21.719.000
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	4.560.000
5.2.02.06.03.0046	Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio	4.560.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	21.612.420.808
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	21.612.420.808
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	21.312.420.808
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	300.000.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	242.987.518
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	242.987.518
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	242.987.518
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.183.080.063
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	6.752.182.063
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	11.200.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	836.188.646

KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	5.904.793.417
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	430.898.000
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	275.000.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	155.898.000
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	3.026.510.000
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	3.026.510.000
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	3.026.510.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	0
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	0
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	16.427.323.280
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	16.427.323.280
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	16.427.323.280
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.881.994.583
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.881.994.583
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.881.994.583
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.599.607.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	93.200.007.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	93.200.007.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	52.017.151.000
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	0
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	28.274.856.000
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	168.000.000
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	0
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	4.500.000.000
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	320.000.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	7.920.000.000
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	600.000.000
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	600.000.000
5.2.03.03.01.0004	Belanja Modal Bangunan Menara Pengawas	600.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	80.000.000

KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	80.000.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	80.000.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.719.600.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.719.600.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.719.600.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	198.005.753.500
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	146.835.288.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	139.808.028.000
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	135.647.603.000
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	3.165.000.000
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	190.000.000
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	805.425.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	7.027.260.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	7.027.260.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	30.992.478.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	20.297.814.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	20.132.314.000
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	165.500.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	10.498.664.000
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	10.498.664.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	196.000.000
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	196.000.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	17.671.987.500
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	9.171.863.000
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	8.480.000.000
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	691.863.000
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	8.294.000.000
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	8.294.000.000
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	206.124.500
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	206.124.500
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	2.296.000.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.296.000.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.296.000.000
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	210.000.000
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	210.000.000
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	210.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.532.335.672
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	794.826.000

KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	108.000.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	108.000.000
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	0
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	686.826.000
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	686.826.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	134.143.000
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	134.143.000
5.2.05.03.02.0004	Belanja Modal Ternak Lainnya	134.143.000
5.2.05.04	Belanja Modal Biota Perairan	16.300.000
5.2.05.04.01	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	16.300.000
5.2.05.04.01.0001	Belanja Modal Ikan Budidaya	16.300.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	575.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	575.000.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	85.000.000
5.2.05.08.01.0006	Belanja Modal Kajian	490.000.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	8.012.066.672
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	8.012.066.672
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	8.012.066.672
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.834.247.670
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.834.247.670
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.834.247.670
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.834.247.670
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	6.834.247.670
5.4	BELANJA TRANSFER	456.365.203.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.274.680.000
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	7.431.200.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.431.200.000

KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.431.200.000
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	843.480.000
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	843.480.000
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	843.480.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	448.090.523.000
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0
5.4.02.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	0
5.4.02.02.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	0
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	448.090.523.000
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	448.090.523.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	448.090.523.000
	Jumlah Belanja	2.497.822.779.133
	Total Surplus/(Defisit)	(108.218.549.516)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	117.218.549.516
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	117.218.549.516
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	6.000.000.000
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	4.000.000.000
6.1.01.01.01.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0
6.1.01.01.01.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0
6.1.01.01.01.0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Rokok	0
6.1.01.01.01.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	1.000.000.000
6.1.01.01.01.0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	2.000.000.000
6.1.01.01.01.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.000.000.000
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	2.000.000.000
6.1.01.01.04.0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.000.000.000
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	9.000.000.000
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	9.000.000.000
6.1.01.02.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.000.000.000
6.1.01.02.01.0005	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Minyak bumi	5.000.000.000
6.1.01.02.01.0006	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam	3.000.000.000

KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
	Gas bumi	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	82.218.549.516
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	74.218.549.516
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	45.218.549.516
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	2.000.000.000
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	7.000.000.000
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	5.000.000.000
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	5.000.000.000
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	10.000.000.000
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	8.000.000.000
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	8.000.000.000
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	20.000.000.000
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	20.000.000.000
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	20.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	117.218.549.516
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.000.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	9.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	9.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	9.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	9.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	9.000.000.000
	Pembiayaan Netto	108.218.549.516
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Ngawi

ONY ANWAR HARSONO